

Volume 15, Nomor 2, Agustus 2011

ISSN : 1410-3133

Paradigma

Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan

**Kebijakan Pemerintah Daerah dan Instrumen Pendukungnya dalam
Pengelolaan Hutan di Indonesia Era Otonomi Daerah**
Asep Saepudin

Penelitian Deduktif dengan Data Kualitatif: Mungkinkah ?
Saptopo Bambang Ilkodar

Brain Drain di Indonesia
June Cahyaningtyas

**Konvensi anti Korupsi PBB dan Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi
di Indonesia**
Regina Décor Carmeli dan Hikmatul Akbar

Partisipasi Masyarakat terhadap Peningkatan Pembangunan Desa
Prastiwi Marijani

**Implementasi Manajemen Periklanan untuk Local Advertiser (Studi
Deskriptif pada Radio SATUNAMAAM di Yogyakarta)**
Isbandi Sutrisno

Paradigma

Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan

DAFTAR ISI

1-11

Kebijakan Pemerintah Daerah dan Instrumen Pendukungnya dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia Era Otonomi Daerah

Asep Saepudin

12-19

Penelitian Deduktif dengan Data Kualitatif: Mungkinkah ?

Saptopo Bambang Ilkodar

20-27

Brain Drain di Indonesia

June Cahyaningtyas

28-40

Konvensi anti Korupsi PBB dan Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia

Regina Décor Carmeli dan Hikmatul Akbar

41-47

Partisipasi Masyarakat terhadap Peningkatan Pembangunan Desa

Prastiwi Marijani

48-59

Implementasi Manajemen Periklanan untuk Local Advertiser (Studi Deskriptif pada Radio SATUNAMA AM di Yogyakarta)

Isbandi Sutrisno

KONVENSI ANTI KORUPSI PBB DAN UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI KE INDONESIA

Regina Décor Carmeli¹

Hikmatul Akbar²

Abstract:

Corruption and money laundering are two of many criminal acts conducted by state official. Realizing this, United Nations creates a convention that can handle such problem. The convention, UNCAC, took into action in the year of 2003. In Indonesia, the corruption conducted by Neloe, the director of a state owned bank, can't easily be solved. General attorney can hardly going back and forth to Switzerland where money put at, and bring the case to International Criminal Court in Den Haag. Indonesia has reformed its law system just like suggested by UNCAC, but there are so many domestic problems that cause the difficulties of bringing back the asset. The Indonesian Law system seems doesn't support the effort, human resources are not so good, and Indonesian state official lack of technical skill. In the other side, there's no good coordination among Indonesian Law apparatus which also can be regarded as the main factor of the failure for taking back the asset.

1 Alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta. Alamat email : Regina_carmeli@yahoo.com

2 Staf Pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta. Alamat email : kiki_sip@hotmail.com

Keywords: UNCAC, Corruption, Asset, Indonesia

Pendahuluan

Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption* - UNCAC) yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh dunia. Pada Bab 5 konvensi tersebut terdapat ketentuan tentang Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) yang dapat memudahkan pemerintah di setiap negara untuk melakukan pengembalian aset hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri kembali ke negara tempat tindak kejahatan korupsi dilakukan. Ide tentang pengembalian aset ini sangat bermanfaat bagi negara-negara berkembang, karena banyak aset hasil korupsi yang dilakukan di negara-negara berkembang dilarikan ke luar negeri. Padahal aset tersebut sangat dibutuhkan bagi pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang yang memang sedang membangun negara mereka. Melalui ketentuan dalam Bab 5

UNCAC tersebut banyak negara yang telah berhasil mengembalikan aset mereka, namun tidak sedikit juga yang masih mengalami kendala dalam pengembalian aset dari luar negeri termasuk Indonesia.

Perhatian PBB terhadap masalah korupsi dapat dilihat sejak tahun 2000. Sidang Majelis Umum PBB ke-55 menghasilkan Resolusi PBB Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000. Resolusi ini menyebutkan perlunya dirumuskan sebuah instrumen hukum internasional antikorupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut sangat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Hal tersebut dikarenakan masalah korupsi sekarang ini sudah memasuki lintas batas negara, hal ini dinyatakan dalam alinea ke empat mukadimah UNCAC (Deplu, 2008:11).

"Convince that corruption is no longer local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it